PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN WALI *ADHOL* KARENA PENGINGKARAN ANAK

Moh. Mursyid Asyari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: m.mursyid.asyari@gmail.com

Abstract: *This study is a juridical analysis to the determination of Bojonegoro Islamic Court petition concerning with the rejection of an adhol guardian caused by a child guardian denial. The judge's legal consideration of the determination of PA Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn regarding with the rejection of the application of an adhol guardian due to a child guardian denial is to be the main topic of the research. The data are obtained through documentation and interview. They are the documentations in the form of the decision of the Islamic Court of Bojonegoro itself and those from judge. Furthermore, the data are analyzed using descriptive method and deductive mindset, which put forward the theory or the arguments of a general nature about the status of guardian and carer of child and setting process of adhol guardian in positive law. It is then drawn conclusions concerning with the establishment of the adhol guardian request. This study concludes that judge rejected the adhol guardian because of the denial of child is still lacking a legal basis, so that a legal certainty in this matter has not reached a minimum threshold of proof.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan PA Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak menjadi bahasan utama penelitian. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dan interview. Dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan data hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang wali nikah dan kedudukan anak serta proses penetapan wali *adhol* dalam hukum positif. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai penetapan permohonan wali *adhol* tersebut. penelitian ini menyimpulkan, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan menolak permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak ini masih kurang dasar hukumnya, sehingga kepastian hukum dalam perkara ini belum mencapai batas minimal pembuktian.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Wali *Adhal* dan Pengingkaran Anak.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Begitu juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, bahwa: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.²

Menurut Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Fiqh Munakahat 1*, dalam beribadah yang dalam hal ini adalah pernikahan, akan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu dari Syarat dan rukun nikah adalah adanya seorang wali yang menikahkan. Namun permasalahannya, bagaimanakah jika wali nikah tersebut enggan atau menolak untuk menikahkan? Dalam hal menolaknya wali untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan calon suami yang sederajat (*sekufu*), hendaknya wali yang menolak ini menyatakan keengganannya menikahkan di hadapan hakim dan menyebutkan sebab-sebab keengganannya setelah diperintahkan hakim.³

Selaras dengan masalah engganannya seorang wali untuk menikahkan anaknya, perkara Nomor : 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn tertanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 14 Maret 2014, merupakan pengajuan surat permohonan dalam kasus Wali *Adhol*. Dalam perkara ini, pemohon yang hendak menikah dengan calon suami pemohon, pada dasarnya dianggap sudah sepadan (*sekufu*) dan juga antara keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun

¹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher, 2008).

² Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre).

³ Muhammad bin Salim bin Hafizh, *Al-Miftahu Libabin Nikah, Kunci memahami Hukum Pernikahan*, S. Alwi bin Isa As-Seggaf, (Surabaya: Cahaya Ilmu Publisher, 2013), 19.

hubungan sesusuan yang menjadi penghalang antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Namun ketika calon suami pemohon berusaha melamar pemohon, wali nikah pemohon tidak berkenan menerima lamaran tersebut dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon.

Penolakan wali nikah pemohon tersebut, dikarenakan wali nikah pemohon tidak mengakui pemohon sebagai anaknya. Sebab ketika wali pemohon masih berstatus suami istri dengan ibu pemohon, wali pemohon ini dengan sengaja mengikuti program KB untuk Pria, yaitu dengan melakukan vasektomi.⁴ Tindakan ini diambil karena sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, tetapi Ibu pemohon hamil lagi. Tindakan vasektomi tersebut membuat wali pemohon ragu apakah anak yang dikandung tersebut adalah anaknya.⁵

Dalam perkara ini, selain pemohon meminta agar membebankan biaya perkara kepada pemohon, pemohon juga meminta kepada Pengadilan supaya mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali nikah pemohon telah *adhol*, dan bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, pemohon mohon perkara tersebut diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Akan tetapi pada akhirnya selain membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- kepada pemohon, Pengadilan Agama Bojonegoro tidak menetapkan wali pemohon sebagai wali *adhol*, tetapi menyatakan bahwa wali pemohon tersebut tidak berhak menjadi wali nikah terhadap pemohon.

Melihat realita yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penyelesaian perkara wali *adhol* ini. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan PA Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak.

⁴ *Vasektomi adalah operasi kecil (bedah minor) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk mencegah transportasi sperma pada testikel dan penis* Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, *Buku Pedoman KB Bagi Kader Dasa Wisma*, (BPPKB), 11.

⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Bojonegoro Nomor 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn, 1-2.

Selain itu juga menjelaskan analisis yuridis terhadap penetapan PA Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan kepada masyarakat dan para praktisi hukum dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang perkawinan. Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya dan memberikan tambahan informasi tentang diskripsi perkara wali *adhol* di Peradilan Agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi hakim Pengadilan Agama sebagai evaluasi dan tambahan informasi tentang perkara wali *adhol*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dan digunakan oleh penulis untuk diteliti dan dianalisis adalah : Data tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutus perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn. data tersebut bersumber dari salinan penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn yang telah dilegaliser dari Pengadilan Agama Bojonegoro serta hasil wawancara dengan Panitera dan Majelis Hakim yang mengadili Perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari wawancara dengan para pakar (ahli) dan dari bahan pustaka yaitu dengan mencari data atau informasi tertulis yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti: *Al-Miftabu Libabin Nikah, Kunci Memahami Hukum Pernikahan*, karya Muhammad bin Salim bin Hafizh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh S. Alwi bin Isa As-Seggaf; *Fikih Sunnah 6* karya Sayyid Sabiq, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib; *Fiqh Munakahat 1* karya Beni Ahmad Saebani; <http://id.wikipedia.org/wiki/Vasektomi>; *Kompilasi Hukum Islam*; *Peradilan Agama* karya Ahrum Hoerudin; *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*; *Risalah Hukum Nikah* karya Fatihuddin Abul Yasin; *Sukses Menulis Karya Ilmiah, Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*

karya Imron Rosidi; *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Juga literatur-literatur lain yang berkaitan dan mendukung penulisan skripsi ini.*

Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁶ Dalam penelitian ini penulis mendeskriptifkan permasalahan dalam penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* yang kemudian dianalisis dengan teori yang telah penulis kumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Tinjauan Umum tentang Proses Penetapan Wali *Adhol* dalam Hukum Positif

Pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya. Dalam KHI, masalah wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai 23. Dalam Pasal 19, KHI mengatakan: "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".⁷

Namun jika terjadi kasus seorang wali nikah *adhol* atau enggan untuk menikahkan anaknya dengan sebab pengingkaran anak, maka sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 23 KHI, yaitu berbunyi⁸:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

⁶ Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62.

⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2012), 72-73.

⁸ Ibid.

Seorang suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.⁹ Dalam UUP, berkenaan dengan masalah pengingkaran anak diatur dalam Pasal 44 yang berbunyi :

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana UUP, dalam KHI juga dijelaskan menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Lebih jelas dinyatakan dalam Pasal 101 dan 102 sebagai berikut.¹⁰

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Secara logika, apabila terjadi kasus pengingkaran anak, maka harus dibuktikan di muka persidangan dengan membuktikan asal-

⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, 282.

¹⁰ Ibid, 283.

usul anak yang diingkari tersebut. Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, UUP di dalam Pasal 55 menegaskan bahwa :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹¹

Namun perlu diketahui, mengenai anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa : *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*.¹²

Selain itu dalam KHI Pasal 99 dikatakan juga bahwa : *“Anak yang sah adalah:*

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”*.¹³

Adapun di dalam memeriksa dan menetapkan perkara wali *adhol* karena pengingkaran anak, Pengadilan Agama harus dapat memutus dan menetapkan perkara tersebut dengan tepat berdasar bukti-bukti yang diperiksa dengan detail dan teliti sehingga ditemukan dasar hukum yang tepat dan akurat untuk memutus perkara tersebut. Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam,¹⁴ yaitu sebagai berikut:

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Rhedbook Publisher, 2008).

¹² Ibid.

¹³ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Alat-alat bukti terdiri atas :

1. Alat bukti surat/ alat bukti akta;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.

Perlu diketahui bahwa harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti itu sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil atau materiil, belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.¹⁵

Penetapan Perkara No. 64/Pdt.P/2014/Pa.Bjn Perihal Penolakan Permohonan Wali *Adhol* Karena Pengingkaran Anak Di PA Bojonegoro

Berdasarkan hasil penelitian pada salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn yang telah dilegalisir, Pada tanggal 14 Maret 2014 Pemohon mengajukan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor : 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn dengan mengemukakan beberapa alasan.

Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami pemohon yang telah dikenalnya sekitar 10 bulan. Bahwa terhadap maksud tersebut, calon suami Pemohon sudah berusaha melamar

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 239.

Pemohon sebanyak 1 kali, namun wali nikah pemohon, tidak mau menerima lamaran tersebut dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasan Wali Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya, sebab ketika Wali Pemohon masih berstatus suami istri dengan ibu Pemohon, Wali Pemohon dengan sengaja melakukan vasektomi (KB untuk Pria) dengan maksud sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun ibu Pemohon hamil lagi dan hal tersebut membuat Wali Pemohon sakit hati pada ibu Pemohon dan anak tersebut.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut pada intinya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memeriksa perkara tersebut dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon telah *adhol*;
3. Membebankan biaya perkara sesuai kepada Pemohon;
4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Dari permohonan tersebut, setelah sidang pemeriksaan perkara Majelis Hakim menetapkan bahwa:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan wali nikah yang dimaksud pemohon tidak berhak menjadi wali nikah terhadap Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Sidang yang hanya dilakukan sekali dan langsung dijatuhkan penetapannya ini dihadiri oleh Pemohon, calon suami Pemohon, Ibu Pemohon dan dua orang saksi, tanpa dihadiri oleh wali Pemohon.¹⁶

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara ini akan langsung sekaligus dianalisis oleh penulis dibawah ini.

¹⁶ Karmin, *Wawancara*, Bojonegoro, 05 Mei 2014.

Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal Penolakan Permohonan Wali *Adhol* karena Pengingkaran Anak

Dari hasil wawancara kepada Hakim Ketua, sidang pemeriksaan penetapan perkara ini hanya dilakukan sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H dan langsung ditetapkan penetapannya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini: *pertama*, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut telah dihadiri Pemohon, calon suami Pemohon, Ibu Pemohon dan dua orang saksi, sehingga Majelis Hakim langsung memeriksa saksi dan mendengarkan keterangan dari Ibu Pemohon dan calon suami Pemohon. *Kedua*, menurut pertimbangan Majelis Hakim dari pengakuan ibu Pemohon dan keterangan para saksi serta calon suami Pemohon sudah cukup untuk memutus perkara ini. *Ketiga*, menimbang dari pihak Pemohon memohon agar Majelis Hakim langsung memutus perkara tersebut pada sidang pertama itu juga, sebab pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 (yaitu 3 hari setelah hari sidang) hari pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah ditetapkan. Menimbang akan hal-hal tersebut dan mengingat motto pelayanan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan proses cepat, tepat dengan biaya ringan, dan bahwa tidak ada perselisihan dan perbedaan pendapat (*dissidence*) di antara Majelis Hakim tentang perkara ini, maka pada sidang pertama itu juga, Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut.¹⁷

Dari hasil wawancara ini dapat kita analisis yang pertama adalah Majelis sidang yang hanya diselenggarakan sekali. Dari sini dapat kita analisis bahwa dalam sidang pertama, jika tergugat/termohon tidak hadir, sedang penggugat/pemohon hadir maka sesuai dengan Pasal 126 HIR/150 R.Bg, dan Pasal 127 HIR/151 R.Bg., sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain.¹⁸ Lebih jelasnya adalah:

¹⁷ Ibid.

¹⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 20.

Pasal 126 HIR/150 R.Bg

Dalam hal yang tersebut pada kedua pasal tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh Ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.

Pasal 127 HIR/151 R.Bg

Apabila salah seorang atau lebih Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin jangan lama. Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. Kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan dipanggil sekali lagi oleh Ketua supaya hadir pada hari persidangan yang lain. Ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua pihak dengan satu putusan saja; perlawanan atas putusan itu tidak diperkenankan.

Dari kedua pasal di atas jika kita aplikasikan dalam perkara ini tentu akan bertentangan, sebab dalam kasus ini, Majelis Hakim hanya menyelenggarakan sidang sekali saja, dan setelah memeriksa kemudian langsung dijatuhkan penetapan atas perkara tersebut pada sidang pertama itu juga, padahal dapat diketahui bahwa wali Pemohon yang dianggap telah *adhol* pada sidang pertama tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Mengacu pada kedua pasal di atas, seharusnya Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil sekali lagi kepada wali Pemohon yang tidak hadir tersebut, agar hadir dalam penetapan hari sidang yang lain.

Selain itu, Majelis Hakim merasa telah cukup untuk memutus perkara dengan hanya memeriksa dan mendengar keterangan dari para saksi, Ibu Pemohon dan calon suami Pemohon. Pada dasarnya, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat (akta) tidak ada atau kurang lengkap. Kemudian penulis menegaskan, dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan

Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa: "*Keterangan saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercayai*". Hal ini menegaskan bahwa keterangan saksi saja tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh Hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁹

Kemudian dari hasil wawancara²⁰, pertimbangan yang ketiga, bahwa dari pihak Pemohon memohon agar Majelis Hakim langsung memutus perkara tersebut pada sidang pertama itu juga, sebab pada hari sabtu tanggal 29 Maret 2014 (yaitu 3 hari setelah hari sidang) pernikahan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah ditetapkan. Menimbang akan hal-hal tersebut, dan mengingat motto pelayanan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan proses cepat, tepat dengan biaya ringan, dan bahwa tidak ada perselisihan dan perbedaan pendapat (*dissidence*) di antara Majelis Hakim tentang perkara ini, maka pada sidang pertama itu juga, Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut.

Memang tepat jika sebuah lembaga pelayanan masyarakat seperti Pengadilan Agama menggunakan motto proses cepat, tepat dan biaya ringan. Namun yang perlu ditekankan adalah ketepatannya dalam mengadili dan kepastian tegaknya hukum. Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mencari keadilan, dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.

Dari keterangan ini jika ditarik dalam kasus, dengan adanya permintaan dari pihak Pemohon agar Majelis Hakim segera memutus perkara tersebut dengan alasan bahwa tiga hari setelah hari sidang tersebut telah ditetapkan hari pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon, dan Hakim mengabulkan dengan

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, 251.

²⁰ Karmin, *Wawancara*, Bojonegoro, 05 Mei 2014.

mempertimbangkan juga bahwa tidak adanya perbedaan pendapat (*dissidence*) dalam Majelis Hakim, maka diputuskanlah perkara tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa ada *interference* atau campur tangan atau sebuah desakan yang mempengaruhi Majelis Hakim dari pihak Pemohon dalam menetapkan perkara tersebut. Sedangkan di dalam memutus sebuah perkara, Majelis Hakim dituntut untuk tetap profesional, independen, bebas dari campur tangan pihak lain serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan seperti yang telah dikatakan oleh penulis di atas.

Dalam mekanisme pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama, haruslah dilakukan dengan sistematis, mulai dari sidang pertama hingga tahap putusan. Dalam hal pengambilan putusan, Hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan, yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.²¹

Kemudian dicantumkan dalam penetapan, bahwa Majelis Hakim menimbang, yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena Pemohon telah mengenal calon suami Pemohon sekitar 10 bulan lamanya dan calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 1 kali, namun wali nikah Pemohon tidak mau menerima lamaran tersebut, dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan wali Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya, sebab ketika wali Pemohon masih berstatus suami istri dengan ibu Pemohon, wali Pemohon dengan sengaja melakukan vasektomi (KB untuk Pria) dengan maksud sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, tetapi ibu Pemohon hamil lagi dan hal tersebut membuat wali Pemohon sakit hati pada ibu

²¹ M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara pengadilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 313.

Pemohon dan Pemohon. Dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tanpa wali ayah Pemohon dan agar wali Pemohon dinyatakan *adhol*.

Dari keterangan di atas, dapat kita pahami bahwa, penolakan wali pemohon untuk menjadi wali nikah pemohon adalah karena wali pemohon tidak mengakui bahwa pemohon adalah anaknya, dengan kata lain adalah karena pengingkaran anak. Seorang suami memang berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak, namun dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam KHI pasal yang menyangkut masalah pengingkaran anak diatur dalam pasal 101 dan 102 sebagai berikut:

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dari kedua pasal di atas, jika seorang suami hendak mengingkari sahnya anak, maka ia harus meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*. Dengan cara mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama. Dan *li'an* sendiri hanya sah dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama sebagaimana

dikatakan dalam pasal 128 KHI. (Selebihnya tata cara *li'an* diatur dalam KHI pasal 126 dan 127).

Namun, melihat salinan penetapan perkara Nomor 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, diketahui bahwa wali pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan. Jika wali pemohon baru menyatakan pengingkarannya setelah melebihi batas waktu yang ditetapkan KHI, yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak, maka menurut hukum, pengingkaran tersebut tidak dapat diterima.

Selain itu berkenaan dengan program KB Vasektomi, di sini perlu diketahui bahwa, walaupun vasektomi dinilai paling efektif untuk mengontrol kesuburan pria, tetapi masih mungkin dijumpai suatu kegagalan. Vasektomi dianggap gagal apabila²²:

1. Pada analisis sperma setelah 3 bulan pasca vasektomi atau setelah 15 sampai 20 kali ejakulasi masih dijumpai spermatozoa;
2. Dijumpai spermatozoa setelah sebelumnya azoosperma;
3. Istri (pasangan) menjadi hamil.

Oleh karena itulah pasien dianjurkan melakukan perawatan dan pemeriksaan pascabedah vasektomi secara rutin. Kunjungan tersebut dilakukan dengan jadwal satu minggu setelah pembedahan, dilanjutkan satu bulan setelah pembedahan, tiga bulan setelah pembedahan, dan satu tahun setelah pembedahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasien dan menilai hasil dari pembedahan tersebut.²³

Oleh karena itu jika terjadi kasus pengingkaran anak seperti dalam perkara ini, dengan alasan seorang suami melakukan program KB Vasektomi namun istri hamil lagi, maka tidak boleh serta merta membenarkan pengingkaran tersebut. Dalam situasi seperti ini perlulah diadakan pembuktian asal-usul anak, karena

²² BPPKB Provinsi Jawa Timur, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Edisi 3 (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011).

²³ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Buku KIE Program KB Nasional*, (BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2010), 3.

seperti keterangan di atas kita ketahui bahwa vasektomi masih memiliki tingkat kegagalan.

Dari sini perlulah kiranya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap asal-usul anak. Masalah pembuktian asal-usul anak ini dalam UUP No.1/1974 di atur pada Pasal 55, yaitu ditegaskan bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penjelasan tentang asal-usul anak di dalam KHI terdapat pada pasal 103, dimana isi pasal 103 KHI ini sama persis dengan pasal 55 UUP.

Dari uraian Pasal 55 UUP di atas, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun sayangnya pada sidang pemeriksaan perkara alat bukti tertulis yang diajukan hanya sebatas E-KTP milik Pemohon, sedangkan Majelis Hakim juga tidak meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti akta kelahiran tersebut. Padahal akta kelahiran yang autentik milik pemohon harusnya dapat memperjelas kedudukan pemohon terhadap wali pemohon. Karena jelas ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) bahwa *“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”*.

Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan alat bukti yang lain. Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: *pertama*, pembuktian

formal, adalah pembuktian antara pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut; *kedua*, pembuktian materiil, yaitu pembuktian antara pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi; *ketiga*, pembuktian mengikat, ialah pembuktian antara para pihak bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis di dalam akta tersebut. Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak memerlukan bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut.²⁴ Mengingat pentingnya kekuatan pembuktian akta autentik ini harusnya Majelis Hakim meminta Pemohon untuk menyerahkan akta kelahiran Pemohon, namun hal ini tidak dilakukan. Dengan demikian berarti hukum pembuktian belum diterapkan dengan teliti hingga mencapai batas minimal pembuktian.

Ayat selanjutnya pada Pasal 55 UUP mengatakan “*Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat*”.

Mengacu pada Pasal 55 ayat (2) ini, jika kita cermati surat salinan penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn., kita akan dapat menilai bahwa sidang pemeriksaan perkara ini belumlah dilakukan dengan teliti dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Karena dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim hanyalah pada keterangan pemohon, calon suami pemohon, keterangan ibu pemohon, dan para saksi. Untuk masalah pembuktian asal-usul anak belumlah dilakukan dengan teliti dan sistematis. Padahal secara rasional, jika permohonan wali *adhol* tersebut karena alasan pengingkaran anak, maka sudah semestinya dibuktikan terlebih dahulu status atau asal-usul anak tersebut, meskipun perkara tersebut bukan perkara permohonan penetapan asal-usul anak, tetapi permohonan wali *adhol* karena pengingkaran

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, 243.

anak. Hal ini dimaksudkan agar dengan membuktikan asal-usul anak tersebut maka akan jelas dan terang masalah pengingkaran anak tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan permohonan wali *adhol* dengan alasan yang lain.

Selanjutnya dalam salinan penetapan perkara ini dikatakan bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan ibu Pemohon dan para saksi dapat ditemukan fakta bahwa pemohon yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1994 adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah antara wali pemohon dengan ibu pemohon. Akan tetapi sebelum ibu kandung Pemohon hamil Pemohon, antara wali pemohon dengan ibu Pemohon sudah hidup berpisah sekurang-kurangnya 1 tahun (keterangan saksi). Selain itu, sejak Ibu Pemohon melahirkan kakak kandung Pemohon, wali pemohon mengikuti program KB Vasektomi dengan maksud sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Sehingga sewaktu ibu Pemohon hamil Pemohon, wali pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya. Selain itu sebelum hamil Pemohon, ibu Pemohon ternyata telah melakukan hubungan badan (hubungan seksual) dengan laki-laki lain dan setelah itu ibu Pemohon hamil Pemohon (keterangan ibu Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut, maka meskipun wali pemohon tidak pernah mengajukan gugatan tentang pengingkaran anak ke Pengadilan, dan Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah antara ibu Pemohon dengan wali pemohon, Majelis berkesimpulan bahwa wali pemohon adalah ayah kandung dan wali nikahnya harus dinyatakan tidak terbukti.

Jika kita analisis kesimpulan Majelis Hakim bahwa wali pemohon adalah ayah kandung dan wali nikahnya dinyatakan tidak terbukti. Hal pertama yang kita lihat adalah dasar kesimpulan hakim. Apabila kita pahami sekali lagi, bahwa yang menjadi acuan atau alat bukti hakim hanyalah keterangan saksi dan pengakuan ibu pemohon. Telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa alat bukti belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.²⁵

²⁵ Ibid, 239.

Pada umumnya keterangan saksi kurang dipercaya, karena sering terjadi kebohongan, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertentangan antara keterangan saksi dan isi suatu akta. Jika hal seperti itu tidak ditolerir maka nilai pembuktian akta autentik akan kehilangan tempat berpijak. Dengan demikian, akan banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan atas akta autentik, padahal telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan pada sisi lain, akan terjadi dalam praktek dengan keterangan saksi, hakim dapat mengesampingkan suatu akta autentik.²⁶

Meskipun pengakuan dan saksi bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti, namun alat bukti ini cenderung tidak dapat dipercaya dengan dasar pertimbangan seperti berikut:

- 1) Lebih cenderung bohong, bahkan dengan sengaja merekayasa kasus dengan tujuan mendapat kemenangan atau bermaksud mempermudah kasus atau jalannya persidangan agar cepat diputus dan selesai.
- 2) Suka mendramatisasi, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya.
- 3) Ingatan manusia terhadap suatu peristiwa tidak selamanya akurat.
- 4) Sering mempergunakan emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa maupun pada saat memberikan keterangan pada persidangan, sehingga kemampuan untuk menjelaskan sesuatu tidak proporsional lagi.²⁷

Apabila kita pahami dengan saksama, memang benar bahwa yang menjadi permohonan Pemohon adalah tentang penetapan wali *adbol*, tetapi sebelum menetapkan permohonan tersebut, di dalam sidang pemeriksaan perlulah kiranya hakim menetapkan asal-usul anak (asal-usul Pemohon) terlebih dahulu. Untuk menetapkan asal-usul anak ini, telah dikatakan di atas, jika bukti akta autentik tidak ada maka Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan secara teliti. Sedangkan pemeriksaan dalam sidang perkara ini hanya dilakukan dengan mendengarkan pengakuan dan

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189.

²⁷ Ibid.

keterangan para saksi. Mengingat kekuatan pembuktian pengakuan dan saksi saja tentunya hal ini tidak cukup dijadikan landasan dalam memutus perkara. Dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Untuk mendapatkan hasil yang jelas dan detail dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu kiranya mendatangkan saksi ahli.

Dalam Pasal 154 HIR/181 R.Bg ayat (1) dan (2), dijelaskan:

- (1) Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya.
- (2) Dalam hal yang demikian maka ditentukan hari sidang bagi pemeriksaan seorang ahli itu baik dengan tertulis maupun dengan lisan, dan menguatkan keterangannya dengan sumpah.

Keterangan saksi ahli amatlah kuat nilai kesaksiannya. Seorang ahli tidak sama dengan seorang saksi. Alat yang digunakan oleh seorang saksi ahli dalam memberikan keterangan di muka sidang Pengadilan Agama didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pikiran dan yang tidak diketahui hakim dalam suatu peristiwa, sedangkan seorang saksi memberi keterangan dalam persidangan Pengadilan berdasarkan panca inderanya.²⁸ Namun pemanggilan saksi ahli ini pun juga tidak dilakukan oleh Majelis Hakim. Padahal dengan didatangkannya seorang saksi ahli, Majelis Hakim akan mengetahui secara pasti asal-usul anak dengan mengadakan tes DNA pada anak tersebut (Pemohon). Dengan demikian hukum pembuktian baru akan mencapai batas minimal pembuktian hingga perkara ini terang dan jelas duduk perkaranya.

Kemudian berkaitan dengan anak sah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, mengatakan : *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Kemudian dalam KHI Pasal 99 dikatakan pula:

²⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...*, 50.

“Anak yang sah adalah :

- a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.*

Dari pasal-pasal di atas, terlihat bahwa antara UUP dan KHI memiliki persamaan dalam merumuskan definisi anak sah. Dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Di sini ada dua pengertian: yaitu dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Jadi, pada intinya anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak sah dengan hak-hak keperdataan melekat pada dirinya.²⁹

Mencermati kasus dalam perkara ini, ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara wali pemohon dengan Ibu pemohon. Jadi berdasar pada kedua pasal di atas, yaitu Pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 99, Pemohon adalah anak sah dari wali pemohon dan ibu pemohon dengan hak-hak keperdataan melekat pada dirinya. Adapun jika wali Pemohon telah enggan atau *adhol*, maka Majelis Hakim harusnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa wali Pemohon telah *adhol*.

Selain itu dalam penetapan perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pada ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa wali pemohon tidak berhak menjadi wali nikah terhadap Pemohon.

Apabila pertimbangan Majelis Hakim dalam salinan penetapan mengatakan berdasar “peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata...*, 78-79.

perkara ini”. Maka dapat penulis analisis: *pertama*, yang dikatakan “peraturan perundang-undangan lain” ini tidak disebutkan dengan jelas peraturan perundang-undangan yang mana dan pasal berapa. Apabila yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, maka dari analisis penulis di atas, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Selanjutnya penggunaan kalimat “serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini” juga tidak disebutkan dengan detail, dasar hukum syar’i yang mana yang menjadi pertimbangan hukum Hakim. Apabila yang dimaksud adalah berkenaan dengan keterbuktian tentang asal-usul anak dan tentang status anak sah, maka telah penulis katakan di atas bahwa hal tersebut belum dibuktikan dengan jelas dan terang. Pertimbangan putusan yang semata-mata “deskriptif”, tetapi tidak argumentatif menurut ketentuan hukum dan dasar-dasar maupun asas-asas hukum, menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya.³⁰

Dari perimbangan-pertimbangan hukum hakim, penetapan yang telah ditetapkan dan dibacakan di depan majelis sidang adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Mukmin bin Radi tidak berhak menjadi wali nikah terhadap Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menanggapi penetapan ini, penulis berbeda pendapat dengan Majelis Hakim. Menurut penulis, karena permohonan Pemohon adalah permohonan tentang wali *adhol* yang disebabkan karena pengingkaran anak, maka dalam sidang pemerikaannya, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan penetapan harus memeriksa dengan teliti terlebih dahulu tentang asal-usul anak. Berbeda dengan permohonan wali *adhol* dengan sebab yang lain. Oleh karena asal-

³⁰ M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama...*, 315.

usul anak tidak dibuktikan. Maka mengingat Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Ibu Pemohon dan Wali Pemohon, maka penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro ini harusnya dapat menerima permohonan perkara wali *adhol* ini dan menetapkan wali Pemohon telah *adhol*.

Dalam kasus ini, menurut penulis penetapan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak hanya dapat ditetapkan dengan mengetahui terlebih dahulu asal-usul anak tersebut. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, pembuktian mengenai asal-usul anak tidak dibuktikan dengan teliti sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan KHI tentang pembuktian asal-usul anak, bahkan majelis hakim hanya berdasar pada keterangan saksi dan Ibu Pemohon. Jadi menurut penulis, penetapan Majelis Hakim yang kedua, yaitu menyatakan wali pemohon tidak berhak menjadi wali nikah terhadap pemohon, belumlah terbukti kebenarannya menurut hukum.

Adapun alasan penulis berpendapat demikian adalah karena menurut penulis, pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perkara ini tidak cukup detail dan teliti, mengingat hal-hal yang telah penulis analisis di atas, yaitu:

1. Sidang hanya dilaksanakan sekali yaitu pada tanggal 26 Maret 2014 dan langsung dijatuhkan penetapannya;
2. Tidak dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya kepada wali Pemohon yang pada saat sidang pertama tidak hadir;
3. Adanya interference/campur tangan dari pihak Pemohon dalam Hakim memutus perkara tersebut;
4. Bahwa Wali Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan;
5. Pengingkaran anak diluar sidang Majelis Hakim dan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak dapat diterima;
6. Program KB Vasektomi yang masih memiliki tingkat kegagalan;
7. Dalam hal penetapan asal-usul anak tidak dibuktikan dengan akta autentik, serta tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

8. Alat bukti Hakim yang hanya berupa keterangan saksi dan Ibu Pemohon serta foto kopi E-KTP tidaklah cukup menjadi dasar hukum untuk memutus perkara;
9. Tidak didatangkannya saksi ahli dalam sidang pemeriksaan perkara;
10. Bahwa Pemohon menurut ketentuan Undang-undang adalah anak sah Mukmin bin Radi (Wali Pemohon);
11. Penyebutan dasar hukum dalam salinan penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn tidak disebutkan seluruhnya secara detail sehingga membuat kabur dasar hukumnya.

Dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa : *“Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.

Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ini sama makna dan tujuannya dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Segala putusan Pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau professional judgement”.

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, pencantuman motivasi pertimbangan yang cukup dalam penetapan dan putusan adalah bersifat “imperatif”. Di situ terdapat kata “harus”. Bahkan dalam Pasal 62 tersebut terdapat pengulangan kata harus, seperti yang dapat dibaca:selain “harus” menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga “harus” memuat pasal-pasal..... . Dari cara pengulangan kata “harus” yang terdapat pada redaksi Pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang dalam dari pembuat undang-undang, agar para hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh karena ketentuan ini bersifat “imperatif”, tidak boleh diabaikan para hakim. Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berfikir secara sistematis dan profesional.

Putusan yang dijatuhkan tanpa motivasi pertimbangan yang cukup, bertentangan dengan Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Oleh karena putusan tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang, putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi.

Putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara saksama pemeriksaan sidang pengadilan. Deskripsi semua fakta dan kejadian yang diketemukan, diolah secara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian dikaitkan dengan hukum materiil yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan. jadi kita melakukan pendekatan "induktif" yang sistematis setahap demi setahap untuk menghimpun suatu kesimpulan hukum tentang keterbuktian atau tidaknya dalil gugat. Pertimbangan putusan yang semata-mata "deskriptif" tetapi tidak argumentatif menurut ketentuan hukum dan dasar-dasar maupun asas-asas hukum, menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya. Apalagi putusan yang langsung mengambil kesimpulan hukum tanpa diuji secara "argumentatif" dan saksama serta menyeluruh dengan fakta dan peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan dengan hukum formal dan materiil yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, adalah suatu putusan yang tidak mampu memperlihatkan titik tolak pertimbangan.

Penutup

Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memeriksa perkara permohonan wali *adhol* dengan register perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn yang diajukan oleh Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, menurut analisis penulis, pertimbangan hukum hakim tidak cukup dijadikan sebagai alat bukti dalam menetapkan perkara tersebut.

Menurut penulis, penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak, yang menyatakan permohonan

Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan wali pemohon tidak berhak menjadi wali nikah terhadap Pemohon ini tidak tepat, karena tidak cukup dasar hukumnya dan sidang pemeriksaan perkaranyapun tidak mencapai batas minimal pembuktian. Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim dapat menerima permohonan wali *adbol* tersebut dan menyatakan bahwa wali Pemohon telah *adbol*. Hal ini menurut penulis karena permohonan Pemohon adalah permohonan tentang wali *adbol* yang disebabkan karena pengingkaran anak, maka dalam sidang pemerikaannya, Majelis Hakim sebelum menetapkan penetapan harus memeriksa dengan teliti terlebih dahulu tentang asal-usul anak. Berbeda dengan permohonan wali *adbol* dengan sebab yang lain. Oleh karena asal-usul anak tidak dibuktikan. Maka mengingat Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Ibu Pemohon dan wali pemohon, dan juga bahwa wali pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan, maka Pengadilan Agama Bojonegoro harusnya dapat menerima permohonan perkara wali *adbol* ini dan menetapkan wali Pemohon telah *adbol*. Namun mengingat penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro yang menolak permohonan wali *adbol* ini, berarti secara tersirat dinyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki wali nikah, dalam kasus seperti ini maka sesuai dengan Pasal 23 KHI, maka wali hakimlah yang menjadi wali nikah bagi pemohon.

Di dalam hal pelayanan dan pemeriksaan perkara, penulis sangat setuju dengan Pengadilan Agama Bojonegoro yang memiliki motto proses cepat, tepat dan biaya ringan. Namun tetap diharapkan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengutamakan ketelitian dalam pemeriksaan perkara hingga cukup dan kuat dasar hukumnya untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan atau penetapan. Hal ini agar terwujudnya kejelasan, keyakinan dan rasa keadilan di hati masyarakat. Selain itu juga demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung sebagaimana visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad bin Salim bin Hafizh, *Al-Miftahu Libabin Nikah, Kunci memahami Hukum Pernikahan*, S. Alwi bin Isa As-Seggaf. Surabaya: Cahaya Ilmu Publisher, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembabaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Buku KIE Program KB Nasional*. BKKBN Provinsi Jawa Timur: t.p., 2010.
- BPPKB Provinsi Jawa Timur. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Edisi 3. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011.
- Salinan Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn.
- Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, *Buku Pedoman KB Bagi Kader Dasa Wisma*. t.tp.: t.p., t.t.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Media Centre).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Rhedbook Publisher, 2008.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg.))
- Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR))
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, Rhedbook Publisher, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.